

**PENGARUH KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP DAYA SAING
PELAKU INDUSTRI JAMU MADURA
(STUDI UMKM JAMU KABUPATEN PAMEKASAN MADURA)**

Teti Sugiarti¹⁾, Nurul Arifiyanti²⁾

¹⁾Fakultas Pertanian, Jurusan Agribisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal Bangkalan Madura, Telp (031) 3011146, email: teti.sugiarti@gmail.com

²⁾ Fakultas Pertanian, Jurusan Agribisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal Bangkalan Madura, Telp (031) 3011146, email: nurul.arifiyanti250691@gmail.com

Abstract

Madura Island is famous for herbal industry which has been passed down from generation to household to small industries. Pamekasan Regency has a community of herbal medicine that has been incorporated but has not been significant in terms of domestic industrial production and in terms of companies that have long been established. In Potre Madura Association there are 15 SMEs joined in Pamekasan District. This study uses primary and secondary data by interviewing herbal medicine IK actors and key informants as well as external environmental dynamics that support IK Jamu. The analysis used is a combination of quantitative and qualitative using aspects of Entrepreneurship Competence, Government Policy and Competitiveness by likert. The description of the analysis uses the Partial Least Square (PLS) approach by looking at the factors that influence the business competitiveness of the herbal industry. The results of the inner model show the relationship between entrepreneurial competence, government policy and competitiveness. The competitiveness of herbal medicine industry entrepreneurs in Pamekasan Regency is directly influenced by entrepreneurial competencies consisting of technical and entrepreneurial competencies and government policies directly affecting entrepreneurial competence.

Keywords: *Competitiveness, Entrepreneurial Competence, Small herbal medicine industry*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara tropis mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi yaitu sekitar 30 000 spesies (Sukandar E Y 2006). Diantaranya memiliki khasiat sebagai obat dalam bidang kesehatan. Sejumlah 9 606 spesies terindikasi dapat dimanfaatkan sebagai obat. Masyarakat Indonesia telah turun menurun dalam menggunakan tanaman obat dan bisa dikatakan sebagai warisan bangsa dari generasi ke generasi. Banyak industri farmasi memanfaatkan bahan alami dari tanaman obat sebagai jamu guna penyembuhan berbagai penyakit tanpa efek samping. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2013, menunjukkan bahwa 40 persen dari 34 persen penduduk Indonesia (sekitar 85 juta orang) menjadi konsumen jamu dan diperkirakan akan terus meningkat

Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 1 340 etnis di Indonesia, hal ini mendukung adanya keunikan dan khasanah dalam pengobatan tradisional. Pemerintah telah mengklasifikasikan tanaman yang merupakan bahan baku pembuatan jamu ke dalam 10 komoditas potensi yang dikembangkan. Kontribusi industri jamu dalam bidang perekonomian Indonesia dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja. Adanya multiplier effect yang signifikan dalam pertumbuhan dikarenakan luasnya cakupan yaitu dari hulu ke sektor hilir yang mana bahan baku yang digunakan hampir 99 persen dari dalam negeri. Jumlah industri jamu di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 1247 buah dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sekitar 15 juta orang (GP jamu, 2014).

Jawa Timur menempati urutan pertama dalam lokasi tumbuhnya tanaman obat yaitu 1 556 dengan lokasi di kebun dan sebanyak 1 356 tempat dibudidayakan oleh masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara, 25 Agustus 2018 | 190

(Kementrian Kesehatan 2015). Khususnya di pulau Madura yang terkenal dengan industri jamu yang telah turun temurun. Industri jamu telah berkembang dari skala rumah tangga hingga industri kecil (IK). Pulau Madura yang hanya terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, sampang, Pamekasan dan Sumenep akan sangat mudah dijumpai petani yang membudidayakan tanama obat seperti jahe, kunyit, cabe jamu, lada dan masih banyak lainnya serta adanya penjual jamu dan sentra pembuatan jamu di daerah tertentu. Seperti halnya di Kabupaten Pamekasan tercatat terdapat 15 jenis tanaman biofarmaka yang telah dibudidayakan oleh petani (BPS, 2012). Jumlah industri kecil jamu dalam catatan BPOM Dinas kesehatan terdapat 15 IK jamu di Sumenep dan 12 IK di Sampang dan diperkirakan akan lebih banyak lagi IK jamu Madura yang tidak tercatat di BPOM, Dinas perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Kesehatan. Industri kecil Jamu di Madura juga telah bergabung dengan Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu) meskipun jumlahnya masih sedikit yaitu 4 IK (gpjambu.org, 2015).

IK jamu Madura sangat berpotensi untuk dikembangkan. Bukan saja karena kesempatan serta potensi pasar yang masih terbuka lebar, namun IK jamu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk masyarakat banyak sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan industri jamu juga merupakan potensi pasar bagi banyak petani tanaman obat di pulau ini. Sektor pertanian (khususnya tanaman obat) akan maju apabila sektor IK maju juga. Untuk itu perlu ada perhatian yang lebih besar terkait dengan pengelolaan dan pengembangan usaha IK jamu agar mampu bertahan dan berkembang lebih baik lagi.

Sugiarti (2010) menyatakan bahwa pengembangan agrindsutri (IK jamu) Pengembangan agroindustri merupakan langkah strategis bagi daerah yang memiliki basis ekonomi di sector pertanian, termasuk Madura. Sektor pertanian dan pengolahan memegang peranan penting diantaranya sebagai sumber mata pencaharian penduduk, suplai bahan makanan, dan pnyerapan enaga kerja. Industri jamu yang sebagian besar industri kecil sangat tepat dikembangkan karena potensi bahan baku yang tersedia dan potensi pasar yang besar (Sugiarti 2009).

Salah satu daerah produksi Jamu Madura yang banyak dikenal di kalangan masyarakat Madura berasal dari Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan memiliki paguyuban jamu yang telah berbadan hukum namun perkembangan IK jamu masih belum signifikan baik dari segi produksi industri rumah tangga maupun dari segi perusahaan yang sudah lama berdiri. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah daerah mengembangkan industri besar maupun yang masih bergerak dalam skala industri rumah tangga agar industri Jamu Madura mampu bersaing di era perdagangan bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

METODE PENELITIAN

Waktu dan lokasi penelitian

Penentuan lokasi dilakukan secara purposive yaitu di Kabupaten Pamekasan dengan pertimbangan adanya paguyuban jamu yang telah berdiri dan memiliki surat ijin serta berbadan hukum. Pada Paguyuban Potre Madura terdapat 15 UMKM yang tergabung di Kabupaten Pamekasan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Mei tahun 2017.

Analisis data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan wawancara pelaku IK Jamu dan informan kunci di Kabupaten Pamekasan serta dinamika lingkungan eksternal yang mendukung IK Jamu. Analisis yang digunakan merupakan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan aspek Kompetensi Kewirausahaan (KM), Kebijakan Pemerintahan (KP) dan Daya Saing (DS) secara likert. Penjabaran analisis menggunakan

pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan daya saing usaha industri jamu.

Variabel yang terdapat dalam Kompetensi Kewirausahaan (KM) terdiri dari pemilihan bahan baku (KT1); pemilihan peralatan dan teknologi yang efisien (KT2); penentuan produksi yang tepat dan efisien (KT3); perencanaan usaha (KM1); koordinasi tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab (KM2); pengawasan (KM3); evaluasi (KM4); penarikan rekan usaha (KM5); komunikasi dengan mitra usaha dan pemerintahan (KM6); pemecahan masalah (KM7); dan pemanfaatan peluang usaha (KM8). Kemudian dilanjutkan pada variabel kebijakan pemerintah yang terdiri dari permodalan (KP1); pelatihan produksi (KP2); pelatihan marketing (KP3); pelatihan keuangan (KP4); bantuan mesin (KP5); pemasaran (KP6); dan perijinan (KP7).

Kedua variabel tersebut (kompetensi kewirausahaan dan kebijakan pemerintah) akan dilakukan analisis hubungan terhadap variabel daya saing (DS1) yang terdiri dari Jumlah pekerja (DS1); eksisting usaha (DS2); kenaikan modal (DS3); jangkauan pemasaran (DS4); dan kenaikan pelanggan (DS5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas dan Realibilitas

Hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan pada variabel Kebijakan Pemerintah (KP), seluruh butir memiliki nilai outer loadings > 0.5 kecuali KP7 dengan nilai outer loading sebesar 0.478. Hal ini menandakan bahwa indikator perijinan tidak valid untuk merefleksikan Kebijakan Pemerintah. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mengeluarkan butir perijinan dan kemudian dilakukan uji validasi. Dari uji validitas yang kedua dihasilkan seluruh butir pertanyaan untuk variabel KP sudah di atas 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran variabel ini sudah memenuhi persyaratan validitas konvergen.

Variabel Kompetensi Kewirausahaan (KM dan KT), butir perencanaan usaha (KM1), pemilihan bahan baku (KT1) dan pemilihan peralatan teknologi efisien (KT2) memiliki nilai outer loadings < 0.5 sehingga dikeluarkan dan diuji kembali nilai validitasnya. Hasil yang diperoleh variabel tersebut sudah memenuhi persyaratan validitas konvergen. Dilanjutkan pada variabel Daya Saing (DS), butir indikator jumlah pekerja (DS1), eksisting usaha (DS2) dan kenaikan pelanggan (DS5) memiliki nilai outer loadings < 0.5 yang berarti bahwa bukan indikator yang valid bagi variabel daya saing. Dari hasil pengulangan uji validitas yakni variabel tersebut sudah memenuhi persyaratan validitas konvergen.

Pada pengujian discriminant validity mendapatkan hasil yakni variabel Kebijakan Pemerintah (KP) mendapatkan nilai akar AVE $=\sqrt{0.553}=0.7436$ yang mana lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten yang lain yaitu -0.301 dan 0.526, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran variabel ini memenuhi persyaratan validitas diskriminan. Variabel Kompetensi Kewirausahaan (KM dan KT), mendapatkan nilai akar AVE sebesar $=\sqrt{0.613}=0.7831$ lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten yang lain yaitu 0.185 dan 0.526, sehingga pengukuran variabel ini memenuhi persyaratan validitas diskriminan. Untuk variabel Daya Saing (Y2), akar AVE sebesar $=\sqrt{0.703}=0.8382$ lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten yang lain yaitu -0.301 dan 0.185, sehingga pengukuran variabel ini memenuhi persyaratan validitas diskriminan.

Pengujian discriminant validity menggunakan nilai cross loadings diperoleh discriminant validity bahwa indikator-indikator pada variabel Kebijakan Pemerintah (KP), nilai korelasi tertinggi ada pada variabel Kebijakan Pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa konstruk laten memprediksi indikatornya sendiri lebih baik daripada indikator laten yang lain.

Indikator-indikator pada variabel Kompetensi Kewirausahaan (KM dan KT), nilai korelasi tertinggi ada pada variabel Kompetensi Kewirausahaan. Hal ini mengindikasikan

bahwa konstruk laten memprediksi indikatornya sendiri lebih baik daripada indikator laten yang lain. indikator-indikator pada variabel Daya Saing (Y2), nilai korelasi tertinggi ada pada variabel Daya Saing. Hal ini mengindikasikan bahwa konstruk laten memprediksi indikatornya sendiri lebih baik daripada indikator laten yang lain. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa variabel ini telah memenuhi discriminant validity.

Pada pengujian composite reliability dengan software SmartPLS, diperoleh sebagai nilai sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Perhitungan Composite Reliability

	Composite Reliability
Daya Saing	0.823
Kebijakan Pemerintah	0.879
Kompetensi Kewirausahaan	0.925

Hasil pengujian diperoleh nilai *composite reliability* semuanya lebih besar dari 0.7, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dari masing-masing variabel adalah reliabel.

Hasil pengujian model hubungan antar variabel (*Goodness of fit*) mendapatkan nilai 56.05. Hal ini mengindikasikan bahwa model cukup baik karena variabel-variabel yang terlibat mampu menjelaskan variabel yang mempengaruhi Daya saing sebesar 56.05%. Sisanya kurang dari merupakan faktor lain yang turut mempengaruhi Daya Saing yang belum dimasukkan dalam kajian dalam penelitian ini.

Outer Model

Dari hasil analisis menggunakan SmartPLS diperoleh loading factor yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan indikator / butir i yang mana yang paling kuat mempengaruhi variabel. Berikut adalah loading faktor yang oleh analisis Partial Least Square.

Tabel 2. Analisis Outer Model (loading factor)

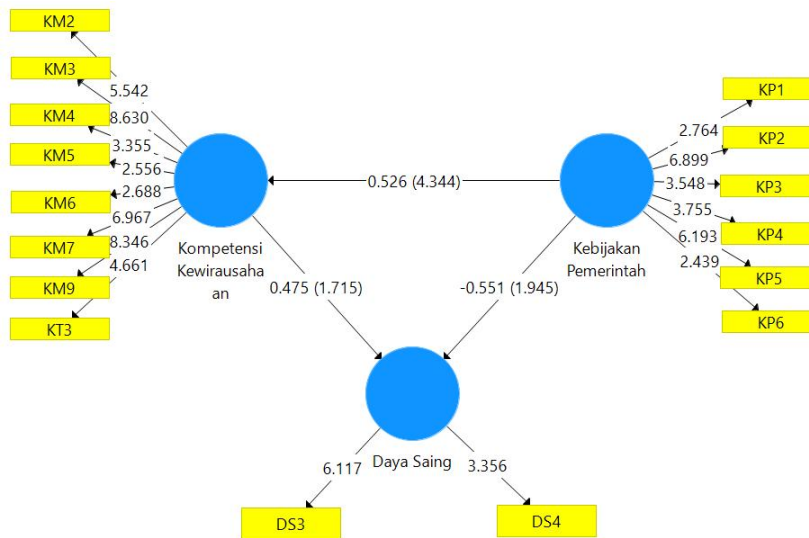
Variabel	Daya Saing	Kebijakan Pemerintah	Kompetensi Kewirausahaan
DS3 (Kenaikan omzet)	0.929		
DS4 (Jangkauan pemasaran)	0.736		
KM2 (Koordinasi tugas)			0.747
KM3 (Pengawasan)			0.900
KM4 (Evaluasi)			0.725
KM5 (Peranan rekan usaha)			0.611
KM6 (Komunikasi)			0.613
KM7 (Pemecahan masalah)			0.850
KM8 (Pemanfaatan peluang usaha)			0.976
KT3 (Penentuan produksi tepat dan efisien)			0.767
KP1 (Permodalan)		0.650	
KP2 (Pelatihan Produksi)		0.851	
KP3 (Marketing)		0.676	
KP4 (Keuangan)		0.782	
KP5 (Bantuan Mesin)		0.858	
KP6 (Fasilitas Pasar)		0.607	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa butir pertanyaan yang paling kuat mempengaruhi variabel Daya Saing adalah Kenaikan Omzet diikuti oleh Jangkauan Pemasaran. Untuk variabel Kebijakan Pemerintah, indikator yang paling kuat mempengaruhi adalah Bantuan Mesin diikuti

oleh Pelatihan Produksi dan yang paling lemah mempengaruhi adalah Fasilitas Pasar. Pada variabel Kompetensi Kewirausahaan, indikator yang paling kuat mempengaruhi adalah Kemampuan Manajerial butir 9 dan yang paling lemah pengaruhnya adalah Kemampuan Manajerial butir 5.

3.3 Inner Model

Hasil kesimpulan inner model antara Daya saing, kompetensi kewirausahaan dan kebijakan pemerintah sebagai berikut :



Tabel 3. Hasil Analisis Pengaruh Masing-masing Variabel

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Values
Kebijakan Pemerintah -> Daya Saing	-0.551	-0.598	0.277	1.988	0.047
Kebijakan Pemerintah -> Kompetensi Kewirausahaan	0.526	0.607	0.123	4.266	0.000
Kompetensi Kewirausahaan -> Daya Saing	0.475	0.578	0.248	1.915	0.056

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel dapat diperoleh hasil

1. Kebijakan Pemerintah (X) berpengaruh signifikan terhadap Daya Saing (Y2) adalah diterima pada taraf nyata 5%. Diperoleh koefisien sebesar -0.551 dan p value sebesar 0.047. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari variabel Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing (yakni semakin meningkatnya Kebijakan Pemerintah maka akan justru menurunkan Daya Saing).
2. Kebijakan Pemerintah (X) berpengaruh signifikan terhadap Kompetensi Kewirausahaan (Y1) adalah diterima pada taraf nyata 5%. Diperoleh koefisien sebesar 0.526 dan p value sebesar 0.000. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel Kebijakan Pemerintah terhadap Kompetensi Kewirausahaan yakni semakin meningkatnya Kebijakan Pemerintah maka akan menaikkan Kompetensi Kewirausahaan

3. Kompetensi Kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap Daya Saing adalah diterima pada taraf nyata 10%. Diperoleh koefisien sebesar 0.056 dan p value sebesar 0.000. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel Kompetensi Kewirausahaan terhadap Kompetensi Daya Saing yakni semakin meningkatnya Kompetensi Kewirausahaan maka akan menaikkan Daya Saing.
4. Sebagai informasi tambahan, diketahui bahwa hubungan langsung antara Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing adalah negatif. Namun pengaruh tidak langsungnya mempunyai koefisien positif sebesar 0.250 dengan p value sebesar 0.189. Artinya pengaruh tidak langsung antara Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing melalui variabel Kompetensi Kewirausahaan adalah positif namun tidak signifikan pada taraf 5% maupun 10%.

KESIMPULAN

Daya saing pelaku industri jamu di Kabupaten Pamekasan sangat dipengaruhi oleh variabel kenaikan omzet didukung dengan variabel pada kompetensi kewirausahaan yang berpengaruh paling besar yakni kemampuan manajerial dan kebijakan pemerintah yang paling berpengaruh yaitu bantuan mesin. Berdasarkan hasil inner model adanya hubungan antara kompetensi kewirausahaan, kebijakan pemerintah dan daya saing. Daya saing pelaku usaha industri jamu di Kabupaten Pamekasan dipengaruhi langsung oleh kompetensi kewirausahaan yang terdiri dari kompetensi teknik dan kewirausahaan. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak mempengaruhi secara langsung pada daya saing karena hasil yang negatif, namun kebijakan pemerintah mempengaruhi secara langsung ke kompetensi kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian kesehatan republik Indonesia. 2015. Laporan Nasional riset khusus eksplorasi pengetahuan lokal etnomedisin dan tumbuhan obat berbasis komunitas di Indonesia. Jakarta
- Sugiarti. 2009. Keragaan Industri kerupuk teripang di Kecamatan Socah (Penulis Utama). Jurnal Rekayasa Universitas Trunojoyo Volume 2. Nomor 2, 2009
- Sugiarti. 2010. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian (Pendekatan Model Basis Ekonomi). Laporan Penelitian Mandiri. Universitas Trunojoyo Madura. Bangkalan
- Sukandar E Y, Tren dan Paradigma Dunia Farmasi, Industri- Klinik-Teknologi Kesehatan, disampaikan dalam orasi ilmiah Dies Natalis ITB, http://itb.ac.id/focus/focus_file/orasi-ilmiah-dies-45.pdf,